



Kebijakan Pendidikan Islam untuk Anak Berkebutuhan Khusus

Erik Aldi Yansyah¹, Andini², Erimawahti³, Sindy cahyani⁴, Juliani⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Correspondence Email: erikaldi004@gmail.com.

ABSTRAK

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Artikel ini membahas kebijakan pendidikan Islam dalam pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, ditinjau dari peraturan nasional serta nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan pendidikan, dan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam telah memberikan dasar yang kuat dalam menegakkan prinsip keadilan, kesamaan hak, dan perlakuan tanpa diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus. Meskipun demikian, penerapan kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, keterbatasan fasilitas pendukung, serta rendahnya pemahaman guru mengenai metode pembelajaran yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih operasional serta peningkatan kemampuan pendidik agar pendidikan Islam yang inklusif dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Anak Berkebutuhan Khusus, Hak Pendidikan, Kebijakan Pendidikan Islam, Pendidikan Inklusif.

ABSTRACT

Islamic education plays an important role in ensuring that every child receives the right to education, including children with special needs. This article discusses Islamic education policies in the implementation of inclusive education for children with special needs, viewed from the perspective of national regulations and the values taught in Islam. This study employs a library research method by examining laws and regulations, educational policies, and various relevant scholarly sources. The findings indicate that Islamic education policies have provided a strong foundation for upholding the principles of justice, equality of rights, and non-discriminatory treatment toward children with special needs. Nevertheless, the implementation of these policies still faces several challenges, such as a lack of competent educators, limited supporting facilities, and teachers' insufficient understanding of appropriate learning methods for children with special needs. Therefore, more operational policies and the enhancement of educators' competencies are needed to ensure that inclusive Islamic education can be implemented effectively and sustainably.

Keywords: Children with Special Needs, Rights to Education, Islamic Education Policy, Inclusive Education.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang harus diberikan kepada semua orang tanpa perlakuan diskriminatif, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam pendidikan Islam, nilai keadilan, kesamaan hak, serta penghormatan terhadap martabat manusia menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan pendidikan. Anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan untuk berkembang secara intelektual, spiritual, dan sosial apabila memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu menghadirkan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah bagi seluruh peserta didik tanpa pengecualian.

Perkembangan konsep pendidikan inklusif mendorong munculnya berbagai kebijakan pendidikan yang menekankan pentingnya pemenuhan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam sejumlah peraturan yang menunjukkan komitmen negara untuk menyediakan pendidikan yang adil dan bebas dari diskriminasi. Dalam ranah pendidikan Islam, kebijakan tersebut menuntut lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun nonformal, untuk menyesuaikan sistem pengelolaan, kurikulum, serta metode pembelajaran agar mampu mengakomodasi perbedaan kemampuan dan karakter peserta didik.

Secara teoretis, pendidikan Islam memiliki dasar normatif yang kuat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Islam memandang setiap manusia sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan, tanpa memandang keterbatasan yang dimilikinya. Nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan kepedulian sosial menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan Islam yang bersifat inklusif. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam tidak hanya berperan sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai wujud penerapan nilai-nilai keislaman dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Walaupun kebijakan pendidikan Islam telah memuat prinsip inklusivitas secara normatif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa masalah yang sering ditemui antara lain keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki keahlian di bidang pendidikan khusus, kurangnya fasilitas pendukung, serta rendahnya pemahaman pendidik dan pengelola lembaga pendidikan Islam terhadap pendekatan pembelajaran yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus. Akibatnya, penyelenggaraan pendidikan Islam yang inklusif belum dapat berjalan secara maksimal.

Di sisi lain, kajian ilmiah yang secara khusus membahas kebijakan pendidikan Islam bagi anak berkebutuhan khusus masih tergolong terbatas. Banyak penelitian yang membahas pendidikan inklusif secara umum tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan karakter dan nilai-nilai khas pendidikan Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh kebijakan pendidikan Islam dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan pendidikan Islam inklusif serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, pengelola lembaga pendidikan Islam, dan pendidik dalam merancang strategi yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (Assingkily, 2021). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam kebijakan pendidikan Islam bagi anak berkebutuhan khusus melalui kajian dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dokumen resmi lembaga pendidikan Islam, serta berbagai buku dan artikel jurnal yang membahas pendidikan Islam, pendidikan inklusif, dan anak berkebutuhan khusus (Abdurrahman, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, memilah, dan mengkaji sumber-sumber yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah isi kebijakan pendidikan Islam serta kesesuaiannya dengan prinsip pendidikan inklusif dan nilai-nilai ajaran Islam. Proses analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi tema, pola, dan kecenderungan yang muncul dalam kebijakan yang diteliti.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi dan dokumen yang digunakan. Selain itu, peneliti juga melakukan kajian kritis terhadap tingkat relevansi dan kredibilitas sumber data. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif dan analitis guna memberikan gambaran yang utuh mengenai kebijakan pendidikan Islam bagi anak berkebutuhan khusus serta dampaknya terhadap pelaksanaan pendidikan Islam yang inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kajian Kebijakan Pendidikan Islam bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia secara normatif telah mengakui hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan layanan Pendidikan Agama Islam. Pengakuan ini terlihat dalam berbagai regulasi yang menegaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlakuan tanpa diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum bagi lembaga pendidikan Islam untuk membuka akses pendidikan yang lebih inklusif.

Di samping aspek hukum, kebijakan pendidikan Islam juga sarat dengan nilai-nilai keislaman yang mendukung praktik pendidikan inklusif. Nilai kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab sosial menjadi dasar pemikiran dalam perumusan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pendidikan Islam sejalan dengan konsep pendidikan inklusif yang berkembang saat ini.

Analisis lebih lanjut memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan Islam memberikan peluang bagi penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran. Fleksibilitas ini memungkinkan lembaga pendidikan Islam menyesuaikan materi Pendidikan Agama Islam dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Namun demikian, sebagian kebijakan yang ada masih bersifat umum dan belum disertai dengan pedoman teknis yang jelas. Kondisi ini menyebabkan perbedaan pemahaman dan penerapan kebijakan di masing-masing satuan pendidikan Islam.

Meskipun kebijakan telah menunjukkan perkembangan, hasil kajian mengungkapkan bahwa pedoman teknis pelaksanaan di tingkat lembaga masih belum

lengkap. Akibatnya, penerapan kebijakan di lapangan berjalan tidak seragam antara satuan pendidikan yang satu dengan yang lain. Kurangnya kejelasan teknis ini menjadi hambatan dalam menjaga pelaksanaan kebijakan agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.(Nusaibah et al., 2025)

Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan Islam telah memiliki kerangka dasar yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Meskipun demikian, kebijakan yang ada masih perlu diperkuat pada aspek teknis dan operasional agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh lembaga pendidikan Islam.

Hasil Implementasi Pendidikan Islam Inklusif di Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan Islam inklusif di lembaga pendidikan Islam masih berbeda-beda. Beberapa lembaga sudah menerima anak berkebutuhan khusus dan berusaha memberikan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, namun mutu pelaksanaannya belum merata di setiap lembaga.

Dilihat dari sisi sumber daya manusia, sebagian besar guru Pendidikan Agama Islam belum memiliki kemampuan khusus dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Walaupun ada kegiatan pelatihan, pelaksanaannya masih terbatas dan belum dilakukan secara terencana serta berkesinambungan.(Rivai et al., 2025)

Kajian terhadap kurikulum menunjukkan bahwa beberapa lembaga pendidikan Islam telah melakukan penyesuaian dalam pembelajaran agama Islam. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan menyederhanakan materi, menggunakan metode pembelajaran yang beragam, serta menyesuaikan bentuk penilaian dengan kondisi peserta didik.

Dari aspek sarana dan prasarana, hasil penelitian menunjukkan masih adanya keterbatasan fasilitas pendukung pendidikan inklusif. Banyak lembaga pendidikan Islam yang belum sepenuhnya menyediakan lingkungan belajar yang ramah dan mudah diakses oleh anak berkebutuhan khusus.

Secara keseluruhan, pendidikan Islam inklusif di lembaga pendidikan Islam sudah mulai diterapkan, tetapi pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal. Temuan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan dukungan teknis dan penyediaan sumber daya yang lebih memadai agar kebijakan pendidikan Islam inklusif dapat diterapkan dengan lebih efektif dan merata.

Hasil Dampak Pendidikan Islam terhadap Anak Berkebutuhan Khusus

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan pendidikan Islam inklusif memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan spiritual anak berkebutuhan khusus. Anak-anak menjadi lebih termotivasi dan menunjukkan kedekatan yang lebih baik dalam mengikuti pembelajaran agama Islam.(Pratiwi, n.d.)

Selain aspek spiritual, dampak positif juga terlihat dalam perkembangan sosial anak berkebutuhan khusus. Mereka menjadi lebih percaya diri dan mampu berinteraksi dengan teman sebaya dalam lingkungan belajar yang ramah dan mendukung, sehingga pengalaman sosial mereka semakin berkembang.

Penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga memiliki peran penting dalam pendidikan Islam inklusif. Dukungan keluarga membantu memperkuat proses pembelajaran sekaligus memberikan dukungan emosional, sehingga anak merasa dihargai, diterima, dan lebih nyaman dalam lingkungan pendidikan.

Dampak positif tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga oleh pendidik. Guru mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap perbedaan dan mengembangkan pendekatan pembelajaran yang beragam, sehingga tercipta suasana belajar yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman.

Meskipun demikian, manfaat pendidikan Islam inklusif tersebut belum dirasakan secara merata di semua wilayah dan lembaga pendidikan Islam. Kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan kebijakan yang lebih kuat serta penyediaan sumber daya yang memadai agar dampak positif pendidikan Islam inklusif dapat dirasakan secara lebih luas.

Pembahasan

Kebijakan dan Landasan Teoretis Pendidikan Islam Inklusif

Kebijakan pendidikan Islam yang menekankan inklusivitas berangkat dari nilai-nilai utama ajaran Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar normatif yang kuat untuk menjamin hak anak berkebutuhan khusus agar memperoleh layanan pendidikan agama yang layak, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. (Putra *et al.*, 2021)

Secara konseptual, paradigma pendidikan inklusif tidak hanya menekankan kehadiran fisik peserta didik di ruang kelas, tetapi juga mengakui perbedaan sebagai potensi dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam idealnya dibangun di atas landasan teologis dan pedagogis yang menempatkan pengembangan spiritual, moral, dan kemampuan kognitif anak sesuai dengan kapasitas masing-masing sebagai prioritas utama. (Solikhah, 2021)

Dalam perumusan kebijakan formal, prinsip-prinsip Islam perlu dihubungkan secara selaras dengan peraturan hukum yang berlaku agar kebijakan dapat dilaksanakan secara jelas dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara norma keagamaan dan regulasi negara membutuhkan penafsiran yang konstruktif sehingga lembaga pendidikan Islam dapat menjalankan pendidikan inklusif tanpa mengesampingkan identitas dan nilai keislamannya.

Kebijakan yang efektif juga menuntut perumusan tujuan pembelajaran agama yang lebih fleksibel dan tidak terbatas pada penyampaian materi secara seragam. Pendekatan pembelajaran perlu disesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus, misalnya melalui pembelajaran berbasis pengalaman langsung, media visual, atau pendekatan multimodal agar nilai spiritual dan pembentukan akhlak dapat tersampaikan dengan baik.

Dalam pengembangan kebijakan pendidikan Islam inklusif, kerangka pemenuhan hak anak harus menjadi bagian penting yang mencakup akses terhadap pendidikan, partisipasi aktif dalam pembelajaran, serta keberlanjutan layanan. Ketiga aspek ini memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga terlibat secara nyata dan memperoleh layanan pendidikan yang berkesinambungan. (Sururin, n.d.)

Perumusan kebijakan juga perlu mempertimbangkan keberagaman lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, pesantren, TPQ, maupun sekolah umum berciri Islam, yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kebijakan nasional sebaiknya dilengkapi dengan ruang adaptasi serta dukungan

teknis agar pelaksanaan pendidikan inklusif dapat diterapkan secara efektif di berbagai konteks lembaga pendidikan.

Kebijakan pendidikan Islam yang berorientasi pada inklusivitas juga menuntut adanya kerja sama lintas sektor, baik antara kementerian, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, organisasi masyarakat, maupun keluarga. Kolaborasi ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menyediakan sumber daya, pelatihan pendidik, serta dukungan sosial yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus di lingkungan pendidikan Islam.

Di samping aturan dan regulasi, keberhasilan kebijakan pendidikan Islam inklusif sangat bergantung pada peningkatan kemampuan pendidik. Guru Pendidikan Agama Islam perlu memiliki keterampilan mengajar yang inklusif, seperti menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa, mengenali kebutuhan masing-masing anak, serta menggunakan media belajar yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus. Tanpa bekal kemampuan tersebut, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tertulis yang tidak berdampak langsung pada proses belajar mengajar. Melalui pelatihan yang terencana dan berkelanjutan, guru dapat memastikan pembelajaran agama Islam dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh peserta didik. (Mughtar & Ali, 2025)

Selain peningkatan kualitas pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan inklusif juga sangat penting. Lembaga pendidikan Islam perlu menyediakan fasilitas yang ramah bagi semua peserta didik, seperti akses bagi pengguna kursi roda, ruang belajar yang nyaman, bahan ajar dengan berbagai bentuk media, serta teknologi pendukung pembelajaran. Lingkungan belajar yang inklusif, baik secara fisik maupun budaya sekolah, akan memperkuat nilai keadilan dan kasih sayang dalam ajaran Islam serta membuat pendidikan Islam lebih menghargai setiap individu (Rizal, 2025).

Kebijakan pendidikan Islam inklusif juga perlu diterapkan melalui model pelaksanaan yang sesuai dengan karakter masing-masing lembaga, seperti madrasah, pesantren, atau sekolah umum berbasis Islam. Penyesuaian kurikulum, kerja sama dengan orang tua, serta penetapan indikator pembelajaran yang fleksibel harus dirancang secara jelas. Pendekatan yang kontekstual dan adaptif akan membantu lembaga pendidikan menerapkan prinsip inklusivitas secara konsisten, sehingga kebijakan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berdampak nyata pada partisipasi dan keberhasilan belajar anak berkebutuhan khusus. (Achmad, 2025)

Pada akhirnya, landasan teoretis kebijakan pendidikan Islam perlu dilengkapi dengan mekanisme evaluasi dan pengawasan yang jelas. Hal ini penting agar kebijakan bersifat dinamis, dapat diperbaiki berdasarkan temuan di lapangan, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pendidikan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang terus berkembang.

Implementasi Kebijakan: Praktik, Sarana, dan Tantangan

Pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam yang bersifat inklusif di tingkat praktik menuntut kesiapan lembaga pendidikan secara menyeluruh. Kesiapan tersebut meliputi kepemimpinan sekolah yang responsif, kebijakan internal yang mendukung, ketersediaan anggaran, serta aturan operasional yang mampu memfasilitasi penerimaan dan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus. Tanpa dukungan

kelembagaan yang kuat, kebijakan inklusif sulit diterapkan secara optimal. (Zainal et al., 2025)

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Guru perlu dibekali kemampuan untuk mengelola kelas yang beragam, menerapkan pembelajaran yang berbeda sesuai kebutuhan peserta didik, serta menggunakan strategi pengajaran yang berorientasi pada individu. Oleh karena itu, program pelatihan guru yang berkelanjutan menjadi bagian penting dalam strategi pelaksanaan kebijakan inklusif. (Rivai et al., 2025)

Kurikulum pendidikan agama Islam juga perlu disesuaikan agar lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi anak berkebutuhan khusus. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan melalui perbedaan tujuan pembelajaran, penggunaan bentuk evaluasi alternatif, serta pemanfaatan media dan alat bantu belajar yang sesuai dengan kebutuhan sensorik, bahasa, dan kemampuan kognitif peserta didik.

Selain aspek kurikulum, ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah inklusi menjadi syarat teknis yang tidak dapat diabaikan. Akses bangunan yang mudah dijangkau, ruang belajar yang nyaman, serta penggunaan bahan ajar audio-visual dan materi dengan bahasa sederhana dapat membantu anak berkebutuhan khusus dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai agama Islam.

Berikut tabel ringkas yang menggambarkan aspek implementasi, praktik umum, dan kendala utama di lembaga pendidikan Islam:

Tabel 1. Deskripsi Implementasi, Praktik dan Kendala Utama

| Aspek implementasi | Praktik umum di lembaga | Kendala utama |
|-----------------------------------|--|------------------------------|
| Kepemimpinan & kebijakan internal | Adopsi kebijakan inklusi secara normatif | Kurangnya pedoman teknis |
| Kompetensi guru | Pelatihan dasar PAI inklusif | Terbatasnya pelatihan khusus |
| Kurikulum | Modifikasi silabus dan tujuan | Standarisasi evaluasi sulit |
| Sarana/prasarana | Penggunaan media adaptif | Keterbatasan anggaran |
| Keterlibatan keluarga | Kolaborasi orang tua-sekolah | Rendahnya pemahaman keluarga |

Secara umum, implementasi pendidikan Islam inklusif di lembaga pendidikan menghadapi berbagai praktik dan tantangan. Kepemimpinan dan kebijakan internal sering kali baru sebatas pengakuan normatif tanpa petunjuk teknis yang jelas. Kompetensi guru masih terbatas karena minimnya pelatihan khusus, sementara penyesuaian kurikulum sering terkendala pada kesulitan standarisasi evaluasi. Di sisi lain, penyediaan sarana adaptif sering terhambat oleh keterbatasan anggaran, dan keterlibatan keluarga belum optimal akibat rendahnya pemahaman tentang pendidikan inklusif.

Aspek pembiayaan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan kebijakan pendidikan Islam inklusif. Tanpa alokasi dana khusus untuk mendukung aksesibilitas, penyediaan bahan ajar adaptif, serta layanan pendukung seperti guru pendamping atau konselor, kebijakan inklusif berpotensi berhenti pada tataran regulasi tanpa implementasi nyata.

Budaya sekolah yang menghargai perbedaan juga berperan besar dalam mendukung pendidikan inklusif. Nilai-nilai penerimaan dan empati perlu ditanamkan kepada seluruh warga sekolah agar praktik inklusif tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga tercermin dalam kegiatan keagamaan dan interaksi sosial sehari-hari.

Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, kegiatan monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara sistematis dengan indikator yang terukur. Indikator tersebut dapat berupa tingkat keterlibatan anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan keagamaan, ketersediaan kurikulum adaptif, serta tingkat kepuasan orang tua. Data hasil evaluasi ini penting sebagai dasar perbaikan dan penguatan kebijakan pendidikan Islam inklusif ke depan.

Tantangan, Strategi Penguatan, dan Rekomendasi Kebijakan

Salah satu kendala terbesar dalam pelaksanaan pendidikan Islam inklusif adalah masih terbatasnya jumlah guru yang memiliki kompetensi untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, kebijakan perlu diarahkan pada penyediaan program sertifikasi guru inklusi serta pemberian insentif bagi lembaga pendidikan Islam yang secara serius meningkatkan kapasitas pendidiknya.

Selain faktor tenaga pendidik, rendahnya pemahaman masyarakat serta masih kuatnya stigma terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan keagamaan juga menjadi penghambat utama inklusi. Untuk mengatasi hal ini, kebijakan pendidikan Islam perlu memasukkan program sosialisasi dan kampanye kesadaran yang menekankan nilai-nilai Islam tentang kemuliaan manusia dan tanggung jawab sosial terhadap sesama.

Keberpihakan kebijakan anggaran juga menjadi faktor penting dalam mendorong pendidikan Islam inklusif. Penyediaan dana khusus untuk penyesuaian sarana dan prasarana, pengembangan bahan ajar digital yang adaptif, serta dukungan tenaga profesional seperti terapis dan konselor akan sangat membantu percepatan proses inklusi di lembaga pendidikan Islam.

Peningkatan mutu kurikulum dapat dilakukan dengan menyusun modul Pendidikan Agama Islam (PAI) yang bersifat inklusif dan mudah diterapkan di berbagai satuan pendidikan seperti madrasah, pesantren, dan TPQ. Modul yang fleksibel dan modular akan memudahkan penerapan pembelajaran yang beragam tanpa mengurangi tujuan utama pendidikan agama Islam. (Rivai et al., 2025)

Penguatan kolaborasi lintas sektor juga perlu menjadi perhatian utama dalam kebijakan pendidikan Islam inklusif. Kerja sama antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta perguruan tinggi dapat menyediakan dukungan sumber daya, penelitian terapan, dan program pelatihan yang berkesinambungan. (Zainal et al., 2025)

Penguatan kegiatan penelitian dan pendokumentasian praktik baik di lapangan juga sangat diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan berbasis pada bukti nyata. Publikasi jurnal terapan dan studi kasus lokal dapat membantu memetakan berbagai model pembelajaran PAI inklusif yang terbukti efektif dan kontekstual.

Pada akhirnya, kebijakan pendidikan Islam inklusif yang ideal adalah kebijakan yang bersifat adaptif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut perlu dilengkapi dengan mekanisme evaluasi berkala, indikator keberhasilan yang jelas, serta sistem perbaikan berkelanjutan agar benar-benar mampu menjamin terpenuhinya hak pendidikan anak berkebutuhan khusus secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pada prinsipnya telah mengakui dan mendukung hak anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang adil dan nondiskriminatif. Prinsip keadilan dan kesetaraan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan seluruh manusia pada kedudukan yang setara. Namun, implementasi pendidikan Islam inklusif di tingkat lembaga masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi pendidik, kurangnya sarana pendukung, serta belum tersedianya pedoman teknis yang jelas. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam perlu diperkuat melalui langkah-langkah praktis dan berkelanjutan, meliputi peningkatan kapasitas pendidik, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat guna mewujudkan sistem pendidikan Islam yang inklusif, manusiawi, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2024). *Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam*. 3, 102–113.
- Achmad, S. (2025). *Inclusive Education Management for Children with Special Needs in Madrasah Ibtidaiyah*. 17(1), 29–55.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Muchtar, Z. I., & Ali, M. (2025). *Inclusive Islamic Education Learning for Students with Intellectual Disabilities in Secondary Schools*. 10(01), 121–134.
- Nusaibah, S., Michelle, D., Nanariain, D., & Istiqamah, D. (2025). *Pendidikan Inklusif Dan Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Indonesia : Tinjauan Literatur Kritis*. 6(7), 3229–3240.
- Pratiwi, W. D. (n.d.). *Praktik Akad Wadi ' Ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Purwokerto*.
- Putra, P. H., Herningrum, I., & Alfian, M. (2021). *Pendidikan Islam untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Kajian tentang Konsep, Tanggung Jawab dan Strategi Implementasinya)*. 2(1), 80–95.
- Rivai, M., Arza, M. Y., Aminarti, P. A., Azis, A., Islam, P. A., & Karawang, U. S. (2025). *Pendidikan Inklusi dalam Konteks Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. 3, 66–79.
- Rizal, Z. A. (2025). *Pendidikan Agama Islam untuk Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Inklusifitas*. 2, 1–23.
- Solikhah, I. (2021). *Konsep Dasar Pendidikan Islam Inklusif: Studi Tentang Inklusivitas Islam Sebagai Pijakan Pengembangan Pendidikan Islam Inklusif*. 7(2), 114–127.
- Sururin. (n.d.). *Pendidikan Agama Islam bagi Anak Berkebutuhan Khusus*.
- Zainal, A., Azura, F., Putri, A. S., & Sari, H. P. (2025). *Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Lembaga Pendidikan Islam : Tantangan dan Solusi*. 3.